

Skripsi

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA LEMBANG SAUKANG DI KABUPATEN SINJAI**

Hike Bin Ambo Tuo

Nomor Stambuk : 105640 156612



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA LEMBANG SAUKANG DI KABUPATEN SINJAI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek
Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Hike Bin Ambo Tuo

Nomor Stambuk : 105640156612

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 169/FSP/A.I-VIII/II/39/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 25 bulan Agustus tahun 2017.



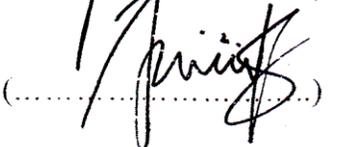
The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a blue shield-shaped emblem. It features a central sunburst with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' is written in white on a blue background across the top of the shield. At the bottom, 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' is written in white. The shield is flanked by two green leaves and a white flower.

TIM PENILAI

Ketua,  Sekretaris, 

Ir. H. Salch Molla, MM **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

Penguji:

1. HJ. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH 
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si 
3. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si 
4. Muchlas M Tahir, S.IP, M.Si 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hike Bin Ambo Tuo

Nomor Stambuk : 105640156612

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpabantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau meleakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.



Makassar , 01 april 2016

Yang Menyatakan,

Hike Bin Ambo Tuo

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “peranan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata lembang saukang di kabupeten sinjai”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang di ajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebelum penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat dalam kepada orang tua penulis, ayahanda Ambo Tuo dan ibunda Jiba yang tercinta atas kasih sayangnya, do'a motivasi dan jerih payah yang telah diberikan tanpa pamrih kepada penulis selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan yang di hadapi oleh penulis namun berkat petunjuk segala bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi. Untuk itu melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu Dra.Hj Muhajirah Hasanuddin, M.Si dan bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos. M.si masing-masing pembimbing I dan pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan arahan sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr.H.Muhammad Idris M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Andi Luhur Prianto, S.Ip, M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ambo Tuo dan Ibunda Jiba tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasannya dalam membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta doa restu yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pemerintah kantor bupati Kabupaten Sinjai yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan angkata 2012 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Terkhusus Kelas A yang telah bersama-sama berusaha keras dan penuh semangat dalam menjalani studi baik suka maupun duka, Kebersamaan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak akan dilupakan

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Makassar ,30 September 2016

Hike Bin Ambo Tuo

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Penerimaan Tim	ii
Halaman Pernyataan Karya hasil ilmiah	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Peranan Pemerintah Daerah	9
B. Konsep Pengembangan Pariwisata.....	17
C. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata	25
D. Kerangka Pikir	29
E. Fokus Penelitian	31
F. Deskripsi Fokus Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	40
B. Peranan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai	42
C. Faktor mendukung dan Menghambat pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai	65
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia sekarang ini sedang dikembangkan untuk memperbesar devisa Negara dan daerah, memperluas lapangan kerja dan meratakan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat setempat. Disamping itu industri pariwisata juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan alam dan budaya daerah yang sangat khas dan menarik. Oleh karena itu pembangunan industri pariwisata tidak dapat diarahkan untuk pembangunan ekonomi atau budaya saja tetapi sebagai salah satu dalam melestarikan budaya dan alam lingkungan hidup.

Renjana Induk Pembanguana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan perencanaan pariwisata daerah pada tingkat Sub-DTW. Dalam proses penyusunannya RIPDA Kabupaten Sinjai. Mengacu kepada dokumen rencana yang berada pada hiarki yang lebih tinggi, yaitu RIPDA Propinsi (kalau sudah tersedia). Selain itu sebagai bagian pengembangan salah satu sector di daerah, maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai.

Rencana Induk Pemerintah Daerah, Kabupaten Sinjai pada tahun 2014-2029 Pekerjaan ini merupakan suatu kegiatan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan pembangunan sector pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah

berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya dan sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian negara. Memasuki abad sekarang perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas, hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi Negara-negara yang menerima kedatangan wisatawan (*tourist receiving countries*).

Peraturan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tersebut awalnya membuat dilema bagi masyarakat sekitarnya, karena didalam pemerintah mengupayakan rehabilitas pantai dan melarang masyarakat melakukan aktivitas yang dapat merusak habitat pantai yang telah direhabilitasi. Sedangkan masyarakat disekitarnya menginginkan bisah memanfaatkan pantai Lembang Saukang tersebut. Dari hal tersebut semestinya pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dengan mengeluarkan perda yang tetap mengakomodir keinginan masyarakat dengan tidak melupakan fungsi lindunganya.

Kendatipun waktu yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembangkan pantai Lembang Saukang cukup lama namun sedikit demi sedikit pengembangan sudah mulai nampak. Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, sarana air bersih di Lurah mananti belum di jangkau oleh PDAM, namun pemerintah telah membuat tempat-tempat penampungan air tiap-tiap dusun dengan kapasitas masing-masing 3,000 liter.

Indonesia merupakan Negara bahari dengan luas 7,7 juta km yang terbagi atas kawasan berupa lautan 75 % (5,8 juta km) dan 25 % (1,9 juta km) yang berupa daerah yang terdiri dari 17,508 buah pulau yang terdiri atas pulau-pulau besar maupun kecil. Indonesia dikenal sebagai Negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar didunia

karena memiliki ekosistem-ekosistem pesisir seperti, hutangrov, tetumbuh karang, dan badang lamuan yang sangat luas dan beragam. Sumber daya ikan diperkirakan terdapat kurang lebih 7.000 jenis ikan terkandung dalam perairan pesisir dan dalam Indonesia. Indonesia juga memiliki panjang garis pantai sepanjang 2 hektar dengan berbagai potensi. Jika melihat kekayaan pesisir tersebut, maka kawasan pesisir berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata (DTW), antaranya yaitu wisata pantai.

Kabupaten sinjai sendiri adalah daerah otonomi Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak dikecamatan Sinjai Timur. Terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bulupoddo, Pulau Sembilan, Sinjai Barat, Sinjai Borong, Sinjai Selatang, Sinjai Tengah, Sinjai Timur, Sinjai Utara, Tellu Limpoe. Kabupaten ini mamiliki luas wilayah 566,51 km dan berpenduduk sebanyak 250.000 jiwa. Wisata lembang saukang terletak di lura kecamatan tellulimpoe, yang jaraknya ada sekitar 10 Km dari kota sinjai, atau 300 Km dari makassar. Berbagai sarana dan prasarana wisata tersedia dikawasan ini, dan itu tentu saja akan memudahkan anda beserta keluarga menikmati kesejukan udara wisata. Jejeran Baruga atau balai-balai dapat anda sewa dengan harga terjangkau. Balai-balai ini sebagai tempat menikmati hamparang air terjun sehabis mandi, jembatan gantung tradisional yang menjajarkan ikan laut yang asik untuk di bakar, lalu disantai bersama ditemani gemuru angin pantai. Selain itu Pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas pantai seperti berjemur, olahraga pantai, berlayar dengan perahu tradisional (balolang), dan aktivitas pantai lainnya.

Mengembangkan suatu potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan kebijakan yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan bersama khususnya dibidang pariwisata yang meliputi beberapa aspek seperti Aspek Ekonomi Perdagangan, Aspek Kebudayaan, Aspek Lingkungan Hidup, Aspek Hukum. 2 Berdasarkan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 setiap

daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak sekali daerah wisata yang sudah terkenal sampai mancanegara. Selain pariwisata merupakan salah satu pemasukan atau devisa negara, pariwisata juga membawa nama negara Indonesia hingga terkenal sampai di dunia. Oleh karena itu pemerintah wajib untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian daerah wisata yang ada di Indonesia melalui instansi- instansi yang telah dibentuk oleh setiap pemerintah Kabupaten yang ditugaskan untuk menangani permasalahan-permasalahan khususnya di bidang pariwisata. Dalam struktur pemerintahan Kabupaten Badung, Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok dalam bidang pariwisata yang secara umum yaitu menyusun rencana, kebijakan operasional, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pariwisata yang meliputi ketatausahaan, sarana pariwisata, obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran pariwisata.

Pengembangan kawasan pariwisata merupakan bagian kegiatan ekonomi yang multi dimensional yang tidak hanya mempunyai tujuan akhir berupa output ekonomi atau nilai financial yang diperoleh tetapi juga menyangkut persoalan sosial, agama, budaya dan keamanan yang bahkan menjadi pariwisata untuk dieksploitasi menjadi daya tarik wisata yang mempunyai daya jual tinggi. Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan kepentingan berbagai pihak yang bahkan antara daerah atau antara Negara.

Di sisi lain pengembangan pariwisata berada pada area tatanan wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang memiliki otoritas dan otonomi daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan potensi wisata akan terjadi saling ketergantungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dalam hal ini Sinjai merupakan salah satu daerah wisata di Propinsi Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai kesamaan dan

keunikan potensi Objek dan Daya Tarik Wisata. Potensi unggulan yang terbesar di daerah Kabupaten Sinjai tersebut dapat dilakukan pengembangan melalui kerjasama antara pemerintah dengan instansi lain, dengan melakukan kesepahaman paket regulasi dan program kegiatan untuk pengembangan objek dan daya tarik wisata serta berbagai deversifikasi kerjasama lain. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan model kerjasama yang paling mendukung pengembangan kepariwisataan dalam kawasan tersebut.

Namun sekarang di karampuang sudah kurang diminati wisatawan disamping karena sudah banyaknya tempat wisata baru di kabupaten sinjai juga kondisi karampuang yang kurang memungkinkan dijadikan objek wisata karena sarana dan prasarana yang sudah kurang memungkinkan, keadaannya pun tidak sebersih dulu lagi karena kurangnya perhatian dari pejabat pemerintah atau Bupati yang dulu. Namun menurut beberapa warga setempat, setelah dilakukannya pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Sinjai dan terpilihnya Bupati baru dari priode 2012-2019 tempat wisata lembang saukang sudah mendapat perhatian dan akan segera dilakukan perbaikan atau renovasi. Juga menurut hasil observasi saya pada hari senin, 03 juli 2013 dan melihat keadaan lapangan sudah banyak material yang disiapkan untuk renovasi baik jalanan maupun untuk perbaikan sarana dan prasarana objek wisata tersebut.

Maka dari itu dibutuhkan peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata di lembang saukang agar para wisatawan yang berkunjung kesana bisa menikmati kembali suasana rekreasi yang nyaman di lembang saukang.

Kabupaten sinjai merupakan daerah memiliki beberapa objek wisata, seperti objek wisata budaya ini merupakan bersejarah dan dijadikan sebagai tempat untuk Pariwisata, dijadikan sebagai tempat objek penelitian maka dari itu perlu pengembangan dan pelestarian untuk objek wisata budaya wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Inilah yang menjadi landasan berfikir penulis menyadari pengembangan objek wisata memerlukan peran dari peran pemerintah daerah, namun dilapangan peran pemerintah daerah tidak terlihat jelas, terbukti masih adanya budaya dan fasilitas penunjang objek wisata yang tidak terawat dengan baik, pada hal pemerintah daerah telah memungut retribusi bagi setiap pengunjung yang akan memasuki kawasan objek wisata. Objek wisata budaya tersebut memiliki cukup daya tarik yang bagus karena objek wisata budaya ini merupakan tempat yang sederhana sehingga dijadikan sebagai tempat untuk objek penelitian bagi para pelajar dari dalam daerah, luar daerah termasuk para pelajar dari luar negeri maka dari itu perlu pengembangan dan pelestarian untuk objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Karena kurangnya fasilitas dan perhatian pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai, contohnya tempat penginapan, kios-kios berjualan souvenir, tempat berjualan makanan dan WC umum dan mesjid. Sehingga saya tertarik karena di tempat objek wisata lembang sau kang ini tangganya tuju tingkat dan jembatan Gantung sehingga saya untuk mengembangkan pemerintah dengan judul Penelitian “*Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai Regulator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaiman peranan pemerintah daerah sebagai Dinamisator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?

3. Bagaimana peranan pemerintah daerah sebagai Fasilitator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?
3. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Sebagai bahan informasi yang bersifat akademis terutama meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap pengembangan sumber daya manusia.

2. Manfaat Praktis Informasi

Sebagai bahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, bagi tokoh masyarakat dan para pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam peran serta pemerintah dalam pengembangan objek wisata lembang sauikang di Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan Pemerintah Daerah

1. Pengertian peranan pemerintah daerah

Peran pemerintah daerah secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara negara (pemerintah) dalam mendefinisikan peranya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Apakah negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, atautkah negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang diluar kemampuan masyarakat. Perbedaan cara pandang pelaksanaan fungsi pemerintah itu digambarkan oleh Pratikno, dari perspektif liberal dan derspektif sosial. Dari perspektif pertama bahwa negara tidak perlu melakukan campur tangan dalam penyediaan pelayanan masyarakat, sementara dari perspektif terakhir diyakini bahwa kehadiran itu mutlak diperlukan. Dalam perspektif liberal, kehadiran pemerintah hanya diperlukan untuk menjaga keamanan.

Sebagaimana yang dikemukakan (labolo,2006:36) peran pemerintah dalam kaitanya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan pada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat,maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pencerahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluhan maupun badan tertentu memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Dapat dipahami dengan dukung realitas yang ada bahwa pemerintah daerah merupakan sub-komponen geografis dari suatu negara berdaulat, sehingga ia berfungsi memberikan pelayanan umum pada suatu wilayah tertentu (sarundanjang, 2011:25); secara operasional refleksi perbedaan itu terapkan dalam prinsip pengeorganisasian pemerintah daerah yang bernuansa administrative atau politis. Secara empiris model-model pemerintah daerah alat Rusia dan pemerintah daerah model inggris mempunyai karakteristik otonomi yang besar semua kekuatan bertumpu pada dewan, menggunakan komite secara luas (sarundanjang, 2011:39). pemerintah daerah model rusia sangat bernuansa administratif, berdasar prinsip-prinsip pencapaian fungsi secara efektif dan efisien dengan mengesampingkan nilai-nilai demokratis.

Sementara pemerintahan daerah model inggris sangat bernuansa politis, sangat memperhatikan nilai-nilai demokratis, sehingga pemerintahan daerah di desain untuk

keseimbangan keinginan negara dan masyarakat lokal. Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsure-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai control dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

2. Pengertian Peranan

Wibawa (2000:81) menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan Soekanto (2001:268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai 2 hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Pemerintah Daerah.

Menurut W.J.S Poerwadarminta (dalam Pramudji. S. 1992) menjelaskan bahwa kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah sendiri berasal dari kata perintah yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu yang harus dilakukan misalnya mereka sudah siap tinggal menunggu perintah.
2. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah sesuatu, negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet pemerintahan) Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No 23 Tahun 2014). Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas Sekertaris Daerah, sekertaris DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan, Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan Objek Wisata Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan juga untuk meningkatkan prestasi manajemen di masa depan dengan menanamkan pengetahuan, perubahan perilaku, atau peningkatan ketrampilan. Menurut Simamora pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa mendatang dalam setiap individu. 4 Dimana perkembangan itu sendiri dapat mengacu pada pengembangan yang bersifat positif dan bersifat negatif hal ini tergantung bagaimana pola pikir manusia dan lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut Hunziger dan Karft (dalam Yoeti 1996) pariwisata merupakan keseluruhan dari pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendidikan itu tidak menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang sementara itu. Spillance (dalam Oka Yoeti 1999) mengemukakan bahwa objek wisata merupakan suatu areal atau wilayah yang terdapat dimuka bumi yang memiliki ciri khas berupa keindahan alamnya. Tentunya sesuatu atau suatu wilayah dapat dijadikan sebagai objek wisata tidak hanya tergantung pada keindahan fenomenanya, melainkan juga karena kekhasanya yang dimiliki oleh objek tersebut. Objek wisata adalah suatu tempat atau benda yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga mengundang perhatian banyak orang untuk menyaksikannya. Begitu pula halnya seperti yang diungkapkan oleh Norwal (dalam Munadi 1953; 39) bahwa objek wisata adalah “suatu tempat yang memiliki daya tarik baik itu karena keindahannya ataupun nilai historis yang terkandung di dalamnya”.

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 aat 2, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah

daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, asal usul dari struktur pemerintah daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan ke-12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Yunani dan latin Kuno. *Koinotes* (komonitas) dan *demos* (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintah daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. *Municipality* (kota atau kota madya) dan varian-variannya berasal dari istilah hukum Romawi *manucipium*. *City* (kota besar) berasal dari istilah Romawi *civitas*, yang juga berasal dari kata *civis* (penduduk). *Country* (kabupaten) berasal dari *comitates*, yang berasal dari kata *comes*, kantor dari seorang penjabat kerajaan.

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu Negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara (*intermediate unit*) seperti provinsi dan unit dasar (*basic unit*) seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*country atau regency*) dan di beberapa Negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Di Indonesia sendiri pemerintah pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan keseluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini di sebabkan pemerintah pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada didaerah, karena mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi

wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yang pertama asas desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang, sekaligus untuk mencapai objektif pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat ada peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Pengembangan Pariwisata

1. Pengertian Pengembangan Pariwisata

Pengembangan berasal dari kata kerja "berkembang" yaitu berarti: mekar terbuka, menjadi besar (luas merata), menjadikan maju (baik, sempurna), jadi pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini menjadikan maju pantai wisata karampuang di kabupaten sinjai. Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.

Secara garis besar ada empat prinsip pengembangan masyarakat, pertama pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (disinterest), kedua pengembangan masyarakat mengubah dan terlibat dalam konflik. Ketiga pengembangan masyarakat membebaskan, membuk masyarakat yaitu kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan pelayanan masyarakat menurut Zubaedi (2014).

Menurut Oka A. Yoeti Dalam Demartoto (2008) pengembangan pariwisata mempunyai beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari Negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

2. Transportasi

Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan kedaerah tujuan wisata yang dituju.

3. Atraksi/objek wisata

Bagaiman objek wisata dan atraksi yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat berikut,apa yang dapat dilihat, apa yang dilakukan dan apa yang dapat dibeli dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) kunjungi.

4. fasilitas pelayanan

fasilitas apa saja yang tersedia dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) tersebut,bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum seperti bank atau *money changers*, kantor pos, telepon atau telex dari Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang akan dikunjungi wisatawan.

5. Informasi dan promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipaang, kemana brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisat dan wisatawan cepat mengambil keputusan.

2. Pengertian Pariwisata

Perkataan pariwisata berasal dari bahasa sengkerta dengan rangkaian suku kata “*peri*” yaitu banyak di tambah dengan “*wis*” yaitu melihat dan “*ata*” tempat. jadi pariwisata merupakan terjemahan dari melihat banyak tempat. Istilah pariwisata berhubungan dengan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Pariwisata pada hakikatnya adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggal. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah Suwantoro (2004).

Kemudian dijelaskan oleh Pitana I Gede (2009) pariwisata mengandung kata kunci “perjalanan” (*tour*) yang dilakukan oleh seseorang demi kesenangan untuk sementara waktu, atau bekerja. Pariwisata yaitu suatu gejala yang sangat kompleks didalam masyarakat, yang oleh karena itu pariwisata kini berkembang menjadi suatu subjek pengetahuan yang pantas dibahas secara ilmiah.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. *The association international des experts sciefique du tourisme* (AIEST) mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan hubungan dan fenomene yang timbul akibat perjalanan dan bertinggalan (*stay*) pada pendatang, namun yang dimaksud pertinggalan bukan berarti bermukim tempat.

Menurut BPS dalam Arifin (2014), pariwisata merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya dari beberapa tempat tujuan diluar tempat tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa bermaksud mencari manfaat tetap. Pariwisata adalah suatu industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan dan standar hidup. Sebagai industri yang kompleks. Pariwisata juga mendukung sektor lainnya seperti penginapan, transportasi dan industri kerajinan tangan.

3. Industri Pariwisata Dalam Sistem Pariwisata

Industri pariwisata dapat di pandang sebagai sebuah sub-sistem dari pariwisata secara keseluruhan. Industri pariwisata dimulai dari trevel generating, dimana calon wisatawan

merencanakan dan memulai perjalanan wisatawannya. Industri pariwisata melibatkan beragam tipe organisasi, maka komposisi atau struktur pada industri pariwisata tersebut.

Cara mengklasifikasikan sektor-sektor yang terlibat dalam industri pariwisata biasanya didasarkan pada fungsinya, walaupun dalam beberapa aspek terjadi tumpang tindih. Berdasarkan klasifikasi Leiper dalam Pitana (2009) terdapat tujuh sector utama dalam industri pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Sektor pemasaran (the marketing sector)

Umumnya sektor pemasaran ini berada di *traveler generation regional* di mana kegiatan promosi dan penjualan produk dan paket wisata dilakukan.

2. Sektor penghubungan (the carrier sector)

Mencangkup semu bentuk dan macam transportasi public, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan empat asal wisatawan dengan tempat tujuan wisatawan.

3. Sektor akomodasi (the accommodation sector)

4. Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman.sektor ini umumnya berada di daerah tujuan wisata dan tempat transit.

5. Sektor daya tarik atau antraksi wisata (the attraction sector)

Sektor ini berfokus pada penyediaan daya tarik atau antaraksi wisata dan wisatawan. Lokasi umumnya terutama pada daerah tujuan wisata tetapi dalam beberapa kasus juga terletak pada daerah transit.

6. Sektor tour operator (the operator sector)

Komponen utamanya berupa transportasi dan akomodasi. Sector ini umumnya terkonsentrasi pada daerah tujuan wisata (tourist destination regional) dan sepanjang rute transit dari asal wisata menuju daerah tujuan wisata.

7. Sektor pendukung/ rupa-rupa (the miscellaneous sector)

Sektor ini mencakup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di Negara / tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun dinegara tempat tujuan wisata. Sektor ini merupakan sektor yang melancarkan sistem pariwisata untuk menjangkau beragam batas geografis.

8. Sektor pengkoordinasi/regulator (the coordination sector)

Mencakup peran pemerintah selalu regulator dan asosiasi dibidang pariwisata selaku penyelenggaraan pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Disamping itu, pengembangan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut Liu dalam piatana (2009).

4. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai social yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas local. Menurut Cox (1985), dalam Dowling dan fannel, (2003: 2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang mereflesikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

2. Preervasi, proteksi, dan meningkatkan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal
5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain maupun meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan antara berbagai elemen yang saling berinteraksi dan mempegaruhi.prinsip-prinsip keseimbangan yang berlalu mendapat perhatian adalah sebagai berikut (Liu, 1994): 10-11;Buckley,(2004: 5-13):

1. Perkembangan *versus* konversi.

Tidak hanya menyangkut bagaimana membangun dan mengelolaa suatu kawasan menjadi objek wisata, mengelolanya harus mempertimbangkan prinsi-prinsip perkelanjutan dan proktesi baik antara pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial bagi keberlanjutan.

2. Penawaran *versus* permintaan.

Pengelola pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan pemerintah (development), dan daya lokal sarana rekreasi, aktivitas budaya dan sebagainya. Sedangkan permintaah mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu wisatawan tipe apa yang akan didasarkan, berapa jumlah yang akan berwisata, dimana mereka akan menginap, berapa uang

mereka akan keluarkan, kegiatan menarik apa yang mereka akan lakukan, dan sebagainya. Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata. Penekanan salah satu atas lainnya akan membawa masalah dimasa yang akan datang.

3. Keuntungan *versus* biaya.

Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan dan mestikan bahwa adanya keseimbangan distribusi keuntungan (benefit) dan biaya (cost). Hal ini menyangkut investasi yang cukup pengelokasian *fee* untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengemalian yang akan optimal atas biaya sosial, ekonomi dan budaya bagi produk lokal, insentif dan bersasaran pajak yang wajar. Dalam praktis rangka menciptakan pengelolaan pariwisata yang mampu membiayai diri sendiri (economically self-sufficint) perlu disusun kebijakan financial yang wajar disampaikan juga harus memperlihatkan factor non ekonomi seperti biaya menjadi salah satu penentuan berkelanjutan pariwisata.

4. Manusia *versus* lingkungan

Tantangan pengembangan para wisata dalam mencari keseimbangan antar tradisional. Disamping beberapa wisata, penduduk lokal kadang belum bahkan tidak menerapkan metode konversasi dalam mengelola sumber daya dimasalalu. Cepat atau lambat kondisi itu tidak akan bertahan mengingat pertumbuhan penduduk begitu cepat yang secara alami akan memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan penghidupan. Keberagaman pariwisata dapat diarahkan sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pariwisata hendaknya menyediakan metode untuk mengelola lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang, dan sebagainya.

C. Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu "Pari" dan "Wisata". pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan Wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafka di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagi macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antara orang baik dari negara yang sama atau antar negara atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan, meskipun pada perkembangan selanjutnya batasan "memperoleh penghasilan" masih kabur. Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya-fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan.

Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat

multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Perkembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu: *Pertama*, Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi, disitus yang tadiknya yang tidak digunakan sebagai atraksi. *Kedua*, Tujuan baru, membangun atraksi pada situs sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi. *Ketiga*, Pengembangan baru sebagai keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas dengan meraih pangsa pasar yang baru. *Keempat*, Pengembangan baru pada antraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengatisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung. *Kelima*, Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan lokasi rung yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karna itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengembanagkan pariwisata. Karena dengan itu cara pengembangan dapat lebih

mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dalam pengembangan pariwisata nasional kita, selain itu juga ada banyak hal yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan ke pariwisata nasional kita di zaman era globalisasi.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, konomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasaran demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan indonesia.

Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan lokasi infestasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpih aranya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi belum di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia.

Selain didukung oleh penataan ruang dan sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya

manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama lain yang lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengembangannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan.

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik objek wisata. Pola pengelolah pengelolaan kawasan wisata yang tidak menyeluruh (*comprehensive*) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik objek wisata, misalnya timbulnya kerusakan lingkungan, meningkatnya urbanisasi ke lokasi objek wisata yang telah meningkat permasalahan sosial antara lain meningkatnya tindak kejahatan dan kegiatan sector informal yang tidak terkendali. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan seperti yang tertuang dalam *Pacific Ministers conference on Tourism and Environment* di Maldifest tahun 1997 yaitu meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konsepasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas, dan *equity inter* dan antar generasi dalam distribusi kesejahteraan.

D. Kerangka pikir

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (labolo, 2006:36) peran pemerintah dalam kaitanya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan pada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1. pemerintah sebagai regulator

peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan pemerintah daerah.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif sebagai pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu Negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Peranan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

BAGAN KERANGKA PIKIR :

Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

1. Sebagai Regulator
2. Sebagai Dinamisator
3. Sebagai Fasilitator

Pengembangan objek wisata lembang saukang

E. Fokus Penelitian

Ada beberapa fokus penelitian, yaitu :

1. Peranan Pemerintah sebagai Regulator
2. Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator
3. Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan sektor pariwisata:

1. Peran pemerintah sebagai Regulator yang diambil dengan pemerintah daerah.
 - a. Infrastruktur pelaksanaan terhadap Retribusi jasa dalam mengembangkan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

- b. Menangani pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap Objek Wisata yang ada di Kabupaten Sinjai.
2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah:
- a. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tetap mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian terhadap Objek Wisata Lembang Saukang.
 - b. Merupakan potensi dan aset budaya yang bernilai tinggi yang berharga dan harus dilestarikan sebagai tempat Objek Wisata Lembang Saukang.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah:
- a. Memperbaiki jalan objek wisata yang rusak.
 - b. Memperbaiki jembatan gantung dan Gazebo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai 18 Januari dan 18 Februari 2017, Objek Wisata Lembang Saukang sebagai penelitian di Kabupaten Sinjai, dengan dasar pertimbangan bahwa meskipun telah dikelola secara keseluruhan akan tetapi perhatian pemerintah masih kurang dapat dilihat dari fasilitas objek wisata yang tidak terpelihara dan bahkan banyak yang rusak seperti Jembatan Gantung, Gazebo, Rumah Panggung dan filla.

peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu; Perencanaan (planning) daerah atau kawasan pariwisata, pembangunan (development) Fasilitas utama dan pendukung pariwisata, Pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).

B. Jenis dan tipe penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan metode wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan instansi yaitu : Kepala Dinas Pariwisata, Lurah Mannanti, Kepala bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, Pengunjung wisata, Kepala Dusun, dan Petugas Retribusi yang ada di Kabupaten Sinjai.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tipe peneliti ini adalah *Fenomenologi* yaitu penelitian berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Tujuan penelitian deksriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta

artinya penjelasan tentang peran pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari penelitian:

1. Data primer

Data diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung.

2. Data skunder

data juga diperoleh dari, buku, jurnal, Koran, situs internet peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai. Penelitian akan turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara. Dari proses wawancara peneliti berharap akan mendapatkan data seperti, bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

D. Informan penelitian

Informan sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *porposive*, yaitu dengan sengaja menentukan informan yang dianggap mengetahui bentuk terhadap objek penelitian terhadap di pengembangan dapat memberikan informasi objek wisata sesuai tujuan penelitian.

Adapun Tabel Informan Terpilih adalah cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian. Informan dalam penelitian ini diantaranya dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Adapun penentuan yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebanyak:

TABEL INFORMAN

No	Nama	Inisial	Jabatan/Strata	Keterangan
1	Ir. H. Muh. Ramlan Hamid,M.Si	RH	Kepala Dinas Pariwisata	1 Orang
2	Andi Imran S.Sos	AI	Lurah Mannanti	1 Orang
3	H. abd. Haris Sanro,SP	AHS	Kepala Bidang Pengembangan Dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Wisata Kabupaten Sinjai	1 Orang
4	Ros Tina	RT	Pengunjung	1 Orang
5	Sahar	SH	pengunjung	1 Orang
6	Ila	IA	Pengunjung	1 Orang
7	Haris	HR	Kepala Dusun Mannanti	1 Orang
8	Abdul Asis	AA	Petugas Retribusi	1 Orang
Jumlah				8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke Objek penelitian untuk mengetahui yang dilakukan Dinas Pariwisata, serta Pengembangan Wisata di Objek yang dijadikan Tempat Wisata.
2. Wawancara, penulis mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat mengenai hal yang menyangkut kerjasama pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai. Pertanyaan yang disampaikan penulis secara lisan dan struktur, agar fokus pembicaraan terarah kepada
3. Dokumentasi, penulis mengkaji naskah-naskah, buku-buku, literature dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kepariwisataan. Studi ini menambah kejelasan dalam membahas secara rinci dan ada korelasinya dengan permasalahan dihadapi oleh kepariwisataan di Kabupaten Sinjai.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan oleh dan di manfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiono, 2009: 246) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Redukasi data

Merupakan komponen pertama analisis data yang mempertengah, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Kajian data

Merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan

simpulan dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data yang diperiksa dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan tehknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut Willian (dalam sugiono, 2009: 273) Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dalam berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilatas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bermakna data yang diperoleh di uji keakuratan dan ketidak akuratannya dengan menggunakan tehknik tertentu.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan tehknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kreadibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Letak Geografis

Kabupaten Sinjai terletak di Kelurahan Mannanti Selatan bagian Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" Lintang Selatan dan 119 48' 30" sampai 120 0' 0" Bujur Timur.

Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa. Wilayah administratif terbagi atas 9 Kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km², atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang

ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan.

b. Visi dan Misi Kecamatan Tellu Limpoe

Dalam mencapai visi tersebut di atas, maka perlu dirumuskan misi yang jelas, hal ini dimaksudkan agar terdapat arah jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi sehingga setiap unit dalam Kecamatan Tellulimpoe mampu menyusun kegiatannya berdasarkan kebijakan dan program yang akan dirumuskan.

Untuk mewujudkan visi kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka ditetapkan misi kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tellulimpoe.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang trampil dan professional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas pengkoordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Tellulimpoe.
6. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang trampil dan professional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.

7. Meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap pelayanan publik dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas pengkoordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

B. Peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai

Peran pemerintah daerah sangatlah penting bagi kesejahteraan masyarakat karena roda pemerintahan dijalankan oleh pemerintah dan kelangsungan hidup masyarakatnya tergantung kepada pemerintahnya, dalam hal ini pemerintah sangatlah berperan penting terhadap suatu objek wisata dalam proses pengembangannya agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dan mensejahterakan masyarakat, seperti halnya dengan Objek Wisata Lembang Saukang. Objek wisata tersebut merupakan situs cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, namun masih terdapatnya fasilitas penunjang yang tidak terawat dengan baik, maka dari itu peran pemerintah daerah sangatlah berpengaruh.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas maka untuk mengukur peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata lembang sauikang Kabupaten Sinjai memerlukan beberapa indikator yaitu peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang indikator tersebut terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, sebagai regulator, pemerintah memberikan

acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Peran pemerintah dalam hal pengembangan objek wisata sangatlah penting karena pemerintahlah memberikan fasilitas kepada daerah agar objek wisata lembang saukang perlu perhatian khusus dari pihak pemerintah karena objek ini merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah dan merupakan aset wisata kabupaten Sinjai. Perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan pihak pengelola serta masyarakat setempat.

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah:

- a. Infrastruktur pelaksanaan terhadap Retribusi Jasa dan mengembangkan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupate Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Sinjai Objek Wisata Lembang Saukng makin meningkat karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan masyarakat Darah Sebagai dari tahun ke tahun, baik dari tempat objek wisata maupun parker untuk memungut biyaya seperti dalam bentuk kartics. masyarakat Daerah Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi tersebut, dibangun mekanisme bahwa 10% dari penerimaan retribusi tersebut meb njadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Objek Wisata Lembang Saukang, yang dapat diandalkan dalam bantu kerjasamnya pemerintah daerah dengan masyarakat di tempat Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai” (Hasil Wawancara dengan RH 23 Januari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator Penerimaan Daerah Kabupaten Sinjai Objek Wisata Lembang Saukng makin

meningkatkan dari tahun ke tahun, baik dari tempat objek wisata maupun parker untuk memungut biaya seperti dalam bentuk kartics.

Terkait dengan pemerintah daerah Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi tersebut, dibangun dan di kembangkan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Objek Wisata Lembang Saukang, yang dapat diandalkan dalam bentuk kerjasamanya pemerintah daerah dengan kepala dinas pariwisata di tempat Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Saya selaku lurah mannanti mengatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat Daerah tersebut yaitu Retribusi jasa dan besarnya tarif untuk anak-anak yaitu 1000 kalau orang dewasa 2500, Tempat Rekreasi objek wisata lembang saukang, dan Untuk itu diperlukan dana yang cukup memadai, dimana salah satu sumber dana yang sangat diharapkan kontribusinya adalah hasil retribusi. Upaya pengembangan tempat-tempat rekreasi objek wisata lembang saukang dilakukan seiring dengan tuntutan masyarakat untuk menikmati fasilitas rekreasi objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara dengan AI 26 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, untuk meningkatkan Pendapatan masyarakat Daerah yaitu memungut Retribusi jasa dan fasilitas yang di sediakan oleh pemerintah daerah dan bekerjasama dengan lurah mannanti untuk Rekreasi objek wisata lembang saukang, dan Untuk itu diperlukan dana yang cukup memadai, dimana salah satu sumber dana yang sangat diharapkan kontribusinya adalah hasil retribusi.

Terkait dengan Upaya pengembangan tempat-tempat rekreasi objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai, dapat di kembangkan denga melakukan kerjasama dalam retribusi yang telah di setuju oleh pemerintah daerah.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni H. abd. Haris Sanro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa Penerimaan Daerah Kabupaten Sinjai Objek Wisata Lembang Saukng makin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari tempat objek wisata maupun parkir. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan masyarakat Darah Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi tersebut, dibangun mekanisme bahwa 10% dari penerimaan retribusi tersebut menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Lembang Saukang. telah menjadi aset andalan bagi Kabupaten Sinjai, hal ini menggambarkan bahwa jasa wisata alam apabila digarap dengan baik dapat menjadi sumber Penerimaan Daerah yang dapat diandalkan”(Hasil Wawancara dengan AHS 27 Januari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, Penerimaan Daerah menesetujui dalam memberikan pelaksanaan retribusi, sehingga kepala bidang pengembangan promosi objek wisata lembang saukang ini makin meningkat karena menunjukkan keseriusan kepala bidang pengembangan promosi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan masyarakat Daerah Sebagai insentif atas tugas menghimpun retribusi tersebut, menjadi insentif bagi Badan Pengelola Khusus Lembang Saukang.

Terkait dengan telah menjadi aset andalan bagi Kabupaten Sinjai, hal ini menggambarkan bahwa jasa wisata alam apabila digarap dengan baik dapat menjadi sumber Penerimaan Daerah

yang dapat diandalkan dengan kerjasamanya kepala dinas pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai kepala dusun mannanti untuk mengetahui dan melihat dalam penanganan retribusi kepada pengunjung objek wisata cukup lumayan banyak pengunjung datang ketempat objek wisata leembang saukang di Kabupaten Sinjai”.(Hasil wawancara dengan HR 23 Januari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, kepala dusun mannanti sangat bekerjasama dengan petugas retribusi dalam melakukan penanganan terhadap objek wisata leembang saukang di kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Petugas Retribusi Kabupaten Sinjai yakni Abdul Asis berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa pemerintah memberikan saya kebijakan untu melakukan tugas menjaga tempat objek wisata leembang saukang ini, setiap orang-orang yang masuk berlibur di tempat objek wisata leembang saukang, haru diberikan kartics untuk menjaga keadaan di tempat pariwisata ini di tarif biaya sebesar 1000 untuk anak-anak dan 2500 untuk dewasa” (Hasil wawancar dengan AA 24 Januari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, pemerintah memberikan kebijakan petugas retribusi untuk melakukan tugas penjagaan tempat objek wisata leembang saukang di Kabupaten Sinjai. Terkait dengan melakukan tugas yang diberikan kepada pengelola pariwisata untuk mengontrol tempat parkir supaya pengunjung nyaman menikmati liburanyan sama keluarga.

b. Mengatur dan menangani pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap Objek Wisata Lembang Saukang yang ada di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa sifatnya dalam hal ini diperkuat dengan promosi wisata, wisata ada dua yaitu wisatawan, dan wisata poster yang kita harapkan poster masuk untuk melanjutkan pengembangan pariwisata lembang sau kang, karena otomatis ada poster anggaran kita tidak dikhawatirkan kita perangkat poster namun kita mempermudah segala izin dalam hal pistornya kita juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan kemudahan akses dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara dengan RH 6 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan pembinaan pengembangan dan pelestarian terhadap objek wisata, dan mempermudah segala izin dalam hal pistornya kita juga mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pengembangan objek wisata di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan kemudahan akses dalam pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang yaitu karena pembinaanya sangat bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa pemerintah harus menangani pembinaan objek wisata Lembang Saukang supaya pengembangan pelestarian akan berkembang mengetahui pembinaan dengan baik apabila tidak ada pembinaan, tempat pariwisata ini tidak berkembang seperti ini, sekarang ini berkembang karena adanya jembatan gantung, gazebo tangga, rumah panggung dan fillah”(Hasil wawancara dengan AI 13 Februari 2017)”.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, pemerintah daerah harus menangani pembinaan dan bekerjasama dengan lurah mannanti, sehingga lurah mannanti musyawara dengan masyarakat membantu melakukan pembinaan dan pengembangan pelestarian kebudayaan, dan membantu melakukan melihat kekurangan dan kelebihan pengembangan dan pelestarian Objek Wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Regulator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku kepala dusun mannanti ikut dalam menangani pembinaan pengembangan objek wisata lembang saukang, sehingga saya kasih ikut masyarakat beberapa orang saja untuk membantu pembinaan pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai”.(Hasil wawancara dengan HR 14 Februari)”.

Berdasarkan Hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan regulator, kepala dusun mannanti sangat berpartisipasi terhadap pembinaan pengembangan objek wisata sehingga dia kasih iku masyarakat juga membantu pembinaan pelestarian terhadap objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

2. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah bagaimana pemerintah membuat objek

wisata yang ada di Kabupaten Sinjai lebih berkembang (dinamis) dengan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tetap mengupayakan dan pelestarian terhadap objek wisata Lembang Saukang karena merupakan potensi dan aset budaya yang bernilai tinggi yang berharga dan harus dijaga dan dilestarikan sebagai warisan leluhur.

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah:

- c. Merupakan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tetap mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian terhadap Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa penanganan dan pemeliharaan Lembang Saukang sebenarnya dibebankan kemudian pemerintah Kabupaten Sinjai hanya untuk pembinaan dan pemeliharaan terhadap Objek Wisata Lembang Saukang karena tempat tersebut merupakan salah satu situs budaya yang dijaga dan dilestarikan”(Hasil wawancara dengan RH 6 Februari 2017)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan dinamisator, pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengupayakan pemeliharaan objek wisata supaya orang yang melakukan penelitian merasah baik karena pemeliharaan ini tetap di jaga dengan pengelolah objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan melalui pelestarian budaya, akan tetapi dalam hal ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sangat mengharapkan kerjasama dari berbagai pihak utamanya dari pengelola objek wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai Lurah mannanti Kabupaten Sinjai telah mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian terhadap objek wisata budaya Lembang Saukang melalui balai cagar budaya, akan tetapi dalam proses pelestariannya kami juga berharap kerjasama dari berbagai pihak utamanya pihak pengelola demi tercapainya pengembangan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai”(Hasil wawancara dengan AI 7 februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan dinamisator, Lurah mannanti mengharapkan pihak utamanya pengelola bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk tercapainya pengembangan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan pemeliharaan objek wisata, utamanya dalam pembinaan ini baik kordinasi atau kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan bali budaya dalam mengembangkan dan melestarikana objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni H. abd. Haris Sanro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku Kepala bidang pengembangan dan promosi wisata pemeliharaan itu dan pelestarian terhadap objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten

Sinjai melalui balai cagar budaya, akan tetapi dalam proses pelestariannya kami juga berharap bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk pemeliharaan dan pelestarian objek wisata lembang saukang dari berbagi pihak utamanya pengelola demi tercapainya pengembangan Objek WisataLembang Saukang di Kabupaten Sinjai”(Hasil wawancara AHS 6 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan dinamisator, selaku pengelola pariwisata harus penting dalam pemeliharaan dan pelestarian terhadap objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian terhadap objek wisata Lembang Saukang melalui cagar budaya akan tetapi dalam hal ini pihak pemerintah Kabupaten Sinjai sangat menharapkan kerjasama dengan masyarakat setempat dari pihak utamanya dari pihak pengelola Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupate Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya peran pemerintah daerah Kabupaten Sinjai terhadap pengembangan objek wisata Lembang Saukang hal ini disebabkan oleh adanya pariwisata yang sudah rusak padahal objek wisata tersebut merupakan aset budaya yang bernilai tertinggi yang patut untuk di lestarikan dan dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa penanganan objek wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai dibebankan melalui bali Cagar budaya (BCB) kemudian pemerintah Kabupaten Sinjai hanya menyiapkan dana pendamping untuk Pembina dan pemeliharaan terhadap Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.

Akan tetapi terkadang terjadi keterlambatan dalam penaganannya sehingga pihak balai cagar budaya mengalami kesulitan dalam mengembangkan objek wista budaya Lembang Saukang serta mengalami kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar siapa-siapa saja yang dilakukan di tempat pariwisata tersebut.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dusun mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Harisberikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai dusun mannanti ikut dalam mengupayakan pemeliharaan pelestarian, diman pemeliharaan ini akan tetap dijaga dengan baik apa bila pemeliharaan ini di biarkan begitu saja perkembanganya tidak berguna, dan pengelola pariwisata ini akan membantu pembinaa terhadap pelestarian dan perkembangan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai”.(Hasil wawancara dengan HR 7 Februari)”.


Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa sebagai kepala dusun mannanti diberikan aman kepada pemerintah dalam melaksanakan tugas maupun itu di pariwisata melakukan pemeliharaan dalam lingkungan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai.

- d. Merupakan potensi dan aset budaya yang bernilai tinggi yang berharga dan harus dilestarikan sebagai tempat Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa tempat ini merupakan aset menurut saya harus dikembangkan karena bernilai budaya sejarah yang tinggi, di samping banyak yang dari luar daerah merasa ada hubungan kekerabatan pemerintah di tempat ini, para pelajar juga datang untuk penelitian tentang benda-benda bersejarah sangat berguna untuk pendidikan para pelajar serta warga Negara asing mengenal budaya bangsa Indonesia melalui Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai” (hasil wawancara dengan RH 10 februari 2017)”.


Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait dengan dinamisor, tempat pariwisata ini merupakan aset menurut saya harus dikembangkan karena bernilai budaya tinggi, di samping banyak pengunjung datang untuk penelitian tandanya bahwa sangat berguna untuk pendidikan para pelajar serta warga Negara asing, mengenal budaya bangsa Indonesia melalui Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan potensi aset budaya yang bernilai tinggi, sehingga pengunjung melakukan penelitian tentang objek wisata lembang saukang, karena mempunyai nilai tinggi sehingga mengenal budaya bangsa Indonesia.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai Lurah mannanti Kabupaten Sinjai tempat pariwisata ini merupakan aset budaya menurut saya harus dikembangkan dan mengontrol dengan melakukan pemeliharaan karena bernilai budaya yang tinggi, di samping banyak yang dari luar daerah untuk mengunjungi objek wisata lembang saukng ini merasa ada hubungan kekerabatan pemerintah antara masyarakat di tempat pariwisata ini, para pelajar juga datang untuk penelitian tentang objek wisata lembang saukang sangat berguna untuk pendidikan para pelajar serta warga Negara asing mengenal budaya bangsa Indonesia melalui Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai” (hasil wawancara dengan AI 10 februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait dengan dinamisor, pariwisata ini sangat berguna untuk pemerintah daerah dan masyarakat ada hubungan kekerabatan pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat merupakan aset budaya dan dikembangkan dan mengontrol bagaimana perkembanganya objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai. Terkait dengan pariwisata dengan melakukan pelestarian karena bernilai budaya yang tinggi, di samping banyak yang dari luar untuk mengunjungi objek wisata lembang

saukng di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni H. abd. Haris Sanro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku Kepala bidang pengembangan dan promosi wisata, Objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset budaya yang bernilai tinggi karena merupakan lembang sauikang dapat berkunjung atau berwisata di Lembang Saukang tersebut, disamping itu banyak juga para pelajar yang banyak untuk melakukan penelitian serta sering juga kedatangan wisatawan luar negeri, maka dari itu sepatutnyalah tempat ini dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya agar aset budaya daerah dapat terjaga dengan baik”.(Hasil wawancara dengan AHS 8 Februari 2017)”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait dengan dinamisator, adanya apresiasi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang bekerjasama dengan pengelola pariwisata, dan harus dilestarikan dan dikembangkan agar aset budaya daerah dapat terjaga dengan baik.

Terkait dengan objek wisata lembang Saukang mengupayakan pelestarian dan pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai. Bentuk apresiasi lain objek wisata ini yaitu sering kedatangan para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan studi banding dan melakukan penelitian objek wisata lembang sauikang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Dinamisator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku kepala dusun mannanti melihat potensi aset budaya yang bernilai tinggi harus di lestarikan karena tempat objek wisata ini berharga bagi pemerintah

daerah dan pengelola objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai''. (Hasil wawancara dengan HR 7 Februari)''.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa tidak terkait dengan dinamisator dalam potensi aset budaya yang bernilai tinggi di tempat objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

3. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah berperan di bidang pendanaan dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Sinjai dengan membangun sarana dan prasarana seperti tempat penginapan bagi para pengunjung. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa masih terbatasnya fasilitas yang memadai dari bantuan pihak pemerintah dalam proses sosialisasi yang akan dilaksanakan, yang sosialisasi ini akan sangat penting guna memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Lembang Saukang Kabupaten Sinjai

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah:

c. Memperbaiki jalan objek wisata yang rusak.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa kita sudah tinjau jalan yang rusak, yang menuju ke tempat objek wisata lembang saukang, sehingga pemerintah melakukan perbaikan jalan objek wisata rusak, sehingga pengunjung merasa nyaman karena jalannya dalam proses perbaikan yang rusak ketempat objek wisata lembang saukang. Seharusnya untuk bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah setempat, melekukan apa saja yang rusak dalam objek wisata lembang saukang salah satu Jalan, Tangga, Gazebo, Jembatan Gantung dan tempat Parkir dan lain-lain''(Hasil wawancara dengan RH 15 februari 2017)''.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melibatkan perbaikan jalan ketempat objek wisata lembang saukang dan dapat membantu pemerintah melakukan perbaikan jalan supaya kelancaran pembangunan ini cepat dikembangkan fasilitas yang ada di objek wisata lembang kita sudah tinjau jalan yang rusak, yang menuju ke tempat objek wisata lembang saukang sehingga pemerintah melakukan perbaikan jalan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Tertarik dengan pengunjung merasa nyaman karena jalannya sudah di perhatikan oleh pemerintah karena kerjasamanya dengan pengelola objek wisata, karena masyarakat ikut bekerjasama dengan melakukan perbaikan jalan ketempat objek wisata lembang saukang di kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Saya selaku lurah mannanti mengatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata lembang saukang merupakan suatu tugas kami untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan tempat rekreasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai terkhusus lembang saukang, dan pariwisata akan memprioritaskan pada rencana aksesibilitas dan modal transportasi guna menunjang pengembangan Pariwisata yakni dengan melakukan perbaikan jalan Objek Wisata yang Rusak, dan menyediakan toilet, musholla, tempat paker, tempat sampah, air bersih dan listrik”(hasil wawancara dengan AI 8 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, lurah mannanti ikut berpartisipasi dalam melakukan perbaikan apa saja yang rusak di objek wisata lembang saukang.

Terkait dengan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan tempat pariwisata yang

ada di Kabupaten Sinjai terkhusus lembang saukang, dan pariwisata akan memprioritaskan pada rencana aksesibilitas dan modal transportasi guna menunjang pembangunan Pariwisata dengan melakukan perbaikan jalan Objek Wisata yang Rusak.

Menurut Teori Labolo

Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni H. abd. Haris Sanro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa Saya selaku kepala bidang pengembangan dan promosi untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak ketempat objek wisata, tapi saat ini pemerintah dalam proses perbaikan jalan yang rusak, karena adanya sosialisai lurah mannanti sehingga lurah melakukan persetujuan kemasyarakat yang punya lokasi apakah di beri izin kepada pemilik lokasi” (Hasil wawancara dengan AHS 10 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, Saya selaku kepala bidang pengembangan dan promosi untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak ketempat wisata, tapi dalam proses pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan ke tempat objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan pengunjung dapat merasa tenang karena jalan tempat objek wisata akan diperbaiki oleh pemerintah daerah, sehingga kelancarn kendaraan masuk ke tempat objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku kepala dusun mannanti untuk membantu pengelola pariwisata, dalam perbaikan jalan objek wisata yang rusak, dan melakukan kerja bakti setiap hari minggu, untuk membantu pengelolaan objek wisata lembang saukang di Kabupaten sinjai”.(Hasil wawancara dengan HR 11 Februari 17)”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, kepala dusun ini sangat bekerjasama dengan pihak pengelola pariwisata, dalam bentuk partisipasi perbaikan jalan ke tempat objek wisata.

d. Memperbaiki jembatan gantung, Gazebo dan Rumah Panggung.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Sinjai yakni Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa mulai 2006 ada pengadaan pembangunan Jembatan Gantung gazebo dengan rumah panggung untuk fillah Opstek perkembanganya tahun 2009 dibikinkan jembatan untuk obje wisata dimana jembata itu ada sekitar kurang lebih 40 mtr ke lokasi objek wisata yang sifatnya tangga jalur prodwal istilanya menuju ke tempat objek wisata, namun dalam hal pertimbangan PAD dan anggaran yang disiapkan uang untuk Lembang Saukang, dimana kita berfikir tentang kepada prioritas sehingga dikategorikan objek wisata yang layak untuk dikembangkan yang menghasilkan PAD, anggaran untuk dinas pariwisata untuk membangun pariwisata dalam menagani 17 masih tahap awal karena baru terdiri secara mandiri menjadi dinas pariwisata kebudayaan di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara dengan RH 6 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan sudah membangun fasilitas yaitu Jembatan Gantung, Gazebo, dan Rumah Panggung itu semua untuk sediakan pengunjung objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan pemerintah pembangunan Jembatan Gantung, Gazebo dengan rumah panggung untuk perkembangan jembatan untuk objek wisata, dimana jembatan itu ada sekitar

kurang lebih 40 mtr ke lokasi objek wisata yang sifatnya tangga jalur prodwal istilanya menuju ke tempat objek wisata, namun dalam hal pertimbangan PAD dan anggaran yang disiapkan uang untuk Lembang Saukang, dimana kita berfikir tentang kepada prioritas sehingga dikategorikan objek wisata lembang saukang yang layak untuk dikembangkan yang menghasilkan PAD, anggaran untuk dinas pariwisata.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Lurah Mannanti Kabupaten Sinjai yakni Andi Imran berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku lurah mannanti untuk melakukan kerjasama perbaikan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung. Ada pelaksanaan untuk memperbaharui kembali tetapi dana belum keluar dari pemerintah daerah karena dalam proses izin kepada yang punya karena lokasi ini masih hak masyarakat”(Hasil wawancara dengan AI 8 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator saya selaku lurah mannanti ikut melakukan perbaikan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung dan masyarakat ikut juga terlibat dalam perbaikan fasilitas objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan Ada pelaksanaan tetapi dalam proses sehingga yang dimaksud untuk memperbaharui perbaikan kembali akan tetapi dana belum keluar dari pemerintah daerah karena dalam proses perizinan kepada masyarakat yang punya lokasi karena lokasi ini masih hak masyarakat.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata Kabupaten Sinjai yakni H. abd. Haris Sanro,SP berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa pihak dari kepala bidang pengembangan dan promosi wisata siap membantu dan mendukung melakukan perbaikan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisat lembang saukang, dalam pembangunan ini harus di kembangkan dengan melakukan perbaikan fasilitas yang rusak dalam pengembangan objek wisata lembang su kang, pemerintah setempat untuk melakukan partisipasi masyarakat ikut melakukan pembangunan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisat lembang saukang di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara dengan AHS 10 Februari 2017)”.


Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, pihak dari kepala bidang pengembangan dan promosi wisata bekerjasama pemerintah dan masyarakat melakukan perbaikan fasilitas yaitu jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan yang ada di objek wisata siap membantu dan mendukung masyarakat melakukan perbaikan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisat lembang saukang, untuk melakukan partisipasi masyarakat perizinan tempat pembangunan jembatan gantung, gazebo dan rumah panggung objek wisat lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Menurut Teori Labolo Tahun 2006:36 Bahwa Peranan Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala dusun mannanti di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya sebagai kepala dusun mannanti membantu kepala dinas pariwisata memperbaiki jembatan gantung gazebo dan rumah panggung dalam proses perbaikan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan perbaikan fasilitas yang ada di objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai” (Hasil wawancara dengan HR 11 Februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fasilitator, kepala dusun sangat berpartisipasi dalam perbaikan fasilitas yang ada di objek wisata lembang saukang di kabupaten Sinjai.

C. Faktor-faktor mendukung dan menghambat pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kecamatan Sinjai

Dengan melihat perkembangan Wisatawan di Objek wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai pada umumnya, hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor berpengaruh terhadap peranan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai, baik faktor mendukung maupun faktor menghambat dan pengembangan Lembang Saukang. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor mendukung

Objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset budaya yang bernilai tinggi karena merupakan lembang saukang terdahulu objek wisata dan kedatangan banyak yang berkunjung atau objek wisata di Lembang Saukang tersebut, disamping itu banyak juga para pelajar yang banyak untuk melakukan penelitian serta sering juga kedatangan wisatawan luar negeri, maka dari itu sepatutnyalah tempat ini dilestarikan dan dikembangkan keberadaannya agar aset budaya daerah dapat terjaga dengan baik. Dalam pengembangan objek wisata Lembang Saukang ini perlu adanya faktor mendukung agar dapat tempat ini berkembang. Penulis mengamati ada beberapa faktor mendukung pengembangan objek wisata budaya Lembang Saukang yaitu sebagai berikut:

a. Apresiasi Pemerintah Daerah

Objek Wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai mendapat apresiasi dari pihak pemerintah daerah karena objek wisata budaya ini merupakan aset budaya daerah yang potensi dan bernilai budaya tinggi, sepatutnyalah objek wisata budaya ini di kembangkan dan dilestarikan, dalam hal ini tidak terlepas dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan adanya dana yang dipersiapkan pihak pemerintah daerah yang digunakan untuk pengembangan dan pelestarian objek wisata budaya Lembang Saukang Kabupaten Sinjai yang kemudian di serahkan kepada balai budaya yang digunakan untuk pemeliharaan objek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pengunjung objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai yakni Ila, berikut pemaparannya:

“Walau pengunjung yang paling banyak datang ke situ tersebut adalah orang-orang yang berwisata, namun pelajar dan mahasiswa kerap datang untuk melakukan studi banding. Iya, pelajar dan mahasiswa biasanya datang untuk studi tour, ada juga melakukan untuk penelitian, selain itu, beberapa kali situs tersebut juga kedatangan wisatawan mancanegara” (Hasil wawancara dengan IA 10 februari 2017)’.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara penulis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya apresiasi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, karena pengunjung juga bekerjasama dengan pemerintah sehingga melakukan studi tuor atau penelitian Objek Wisata Lembang Saukang karena adanya apresiasi pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai.

Terkait dengan mengupayakan pelestarian dan pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai. Bentuk apresiasi lain objek wisata ini yaitu sering kedatangan para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan studi banding dan melakukan penelitian.

b. Dukungan Pengunjung setempat dan Pengunjung luar daerah

Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset daerah Kabupaten Sinjai yang patut untuk di kembangkan kerana mempunyai nilai budaya yang tinggi, Lembang Saukang juga

mendapat dukungan dari pengunjung setempat dan dukungan dari pengunjung luar apalagi mendapat dukungan dari warga, maka dari itu sangat sepatutnyalah tempat ini dilestarikan, karena masyarakat luar daerah menilai bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan warga di Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai sangat bernilai budaya yang tinggi, disamping mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai, Lembang Saukang juga mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat dan masyarakat luar utamanya warga Negara asing.

Berdasarkan Hasil Wawancara Pengunjung Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai yakni Sahar, berikut pemaparannya:

“Banyak pengunjung dari luar yang datang di tempat ini untuk berwisata apalagi itu kalau musim-musim Ziarah seperti sudah idul fitri dan idul Adha, pengunjungnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi. biasa juga saya lihat warga negara asing yang datang seperti saya liat untuk belajar mungkin, ada juga para pelajar yang datang untuk melakukan studi banding”.(Hasil wawancara dengan SH 10 februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dukungan dari pengunjung setempat dan dukungan pengunjung luar daerah akan mendapatkan apresiasi pemerintah daerah sehingga pengunjung ini merasa bangga kepada pengelola objek pariwisata di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan pengunjung yang berasal dari luar daerah yang datang untuk berwisata di Lembang Saukang Kabupaten Sinjai berharap agar tempat ini di lestarikan dan dikembangkan agar kedepannya meningkat lagi seperti ini dapat terawat dengan baik karena adanya kerjasama dengan pengunjung objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai.

2. Faktor menghambat

Lembang Saukang Kabupaten Sinjai merupakan aset daerah yang mempunyai nilai budaya yang sangat tinggi, tempat ini dalam proses masyarakat karena belum paham sehingga menjadi faktor menghambat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, dalam hal pengembangannya. Akan tetapi dalam hal pengembangannya mengalami beberapa hambatan yaitu sebagai berikut:

a. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan Masyarakat

Seorang pengelola harus memahami tentang tempat yang di kelolanya agar para pengunjung dapat menerima informasi yang diinginkan dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman tentang Lembang Saukang Kabupaten Sinjai, pengelola maupun masyarakat harus mengetahui objek wisata budaya tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai objek wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai, padahal salah satu syarat untuk menjadi pengelola tempat tersebut harus mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Kepala Dusun mannanti Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai yakni Haris berikut pemaparannya:

“Mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dusun mannanti Objek wisata lembang saukang, memang masih mengalami faktor menghambat karena pemahaman masyarakat belum paham tentang objek wisata lembang saukang sehingga menjadi faktor menghambat objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai”.(Hasil wawancara dengan HR 9 februari 2017)”.’.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak pengelola pariwisata harus melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang objek wisata, supaya faktor menghambat ini tidak terjadi di objek wisata lembang saukang di Kabupeten Sinjai Terkait dengan pemahaman dan pengetahuan

masyarakat dalam terjadinya faktor menghambat objek wisata, pemerintah juga akan memberikan pemahaman dan pengetahuan objek wisata kepada masyarakat supaya faktor menghambat ini akan di benahi dengan adanya kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku pengunjung objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai yakni Ros Tina berikut pemaparannya:

“Saya pribadi masih sangat kurang paham tentang Lembang Saukang, kami yang berkunjung di sini sering bertanya kepada pihak pengelola tapi ada juga yang menjawab singkat saja, jadi saya merasa kurang paham tentang tempat ini (Hasil wawancara dengan RT 10 februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengunjung belum paham tentang objek wisata ini karena terjadinya faktor menghambat, karena pemahaman dan pengetahuan masyarakat belum paham sehingga pengunjung juga kurang paham tentang objek wisata lembang sauikang di Kabupaten Sinjai.

b. Sosialisasi

Salah satu faktor yang menghambat berkembangnya suatu objek wisata yaitu sosialisasi yang di lakukan pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Penanganan dan pemeliharaan Objek Wisata Lembang Saukang Kabupaten Sinjai di bebaskan melalui balai cagar budaya (BCB), kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang menyiapkan dana pendamping untuk pembinaan dan pemeliharaan terhadap Lembang Saukang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan sosialisasi kemasyarakatan sebagai akibat masih terbatasnya dana yang disiapkan untuk sosialisasi, padahal pihak pemerintah Kabupaten Sinjai sudah memberikan berupa dana kepada pihak objek wisata dalam proses pengembangan dan pelestarian Lembang Saukang Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku pengunjung objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai yakni Ila berikut pemaparannya:

“Kalau berbicara tentang sosialisasi, masih sangat kurang hal ini mungkin disebabkan karena masih terbatasnya dana untuk sosialisasi, selama saya mengunjungi di sini jarang sekali ada sosialisasi yang dilakukan saya kira hal seperti bagus untuk dilakukan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Lembang Saukang Kabupaten Sinjai”. (Hasil wawancara dengan IA 14 februari 2017)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dana untuk sosialisasi dan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan sosialisasi kurang dilakukan oleh masyarakat karena dana masih terbatas dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku pengunjung objek wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai yakni Sahar berikut pemaparannya:

“Sosialisasi sangat perlu untuk dilakukan karena itu kan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, maka dari peran pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelola pariwisata, sangat diperlukan agar objek wisata budaya ini dapat berkembang dan dikenal di luar daerah”. (Hasil wawancara dengan SH 10 februari 2017)”.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sosialisasi itu sangat perlu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat dalam objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai, pengelola juga akan membantu memberikan sosialisasi dan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat atau pengunjung objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai,
 - b. Sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah,
 - c. Sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif sebagai pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
1. Faktor-faktor yang menjadi mendukung dan menghambat pengembangan Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Mendukung
 1. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah sebagai Regulator pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.
 2. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah sebagai Dinamisator pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.
 3. Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah sebagai Fasilitator pengembangan objek wisata lembang saukang di Kabupaten Sinjai.

b. Faktor Menghambat

1. Terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan masih terbatasnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam tentang Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

2. Sosialisasi

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan sosialisasi kemasyarakatan sebagai akibat masih terbatasnya dana yang di siapkan untuk sosialisasi, pada hal pihak pemerintah Kabupaten Sinjai sudah memberikan berupa dana kepada pihak Balai cagar budaya dalam proses pengembangan dan pelestarian Objek Wisata Lembang Saukang di Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu di kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya pemerintah daerah Kabupaten Sinjai bekerjasama dengan pengelola objek dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawabnya mengenai pengembangan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai.
2. Perlu adanya kerjasama yang di lakukan pihak pemerintah daerah dengan pengelola serta masyarakat setempat dalam pengembangan objek wisata lembang sau kang di Kabupaten Sinjai karena merupakan aset budaya yang bernilai tinggi.
3. Perlu pembenahan sarana dan prasarana yang ada pada area objek wisata lembang sau kang di Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2014. *Peranan Objek Wisata Waduk Gurung Rpwo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Dasar Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sulawesi Selatan. 2005. *Inventarisasi Objek Wisata Potensial di Sulawesi Selatan*.
- Hamander, Jorgansen.1994 The Tradisional Rote Of
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, M.1994 Manajemen Personalialia, jakarta: Djembatan.
- Pitana I Gede, dkk. 2009. *pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta:Rafsanjai
- Riwu, Kaho, 1997. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta:Raja Grapindo Persada
- Sarungdajang, 2011. *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, PT. Wikimedia: Manado
- Sangadji, Etta Mamang, 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Andi
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, (Djakarta: Ghalia Indonesia,1984)
- Usman dan Satiawati, 2001. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar Bandung*. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Rebuplik Indonesia No.10 tahun 2009 *Tentang Kepariwisataaan*
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah(Pemda)*
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2008 *Tentang Pemerintahan Daerah/Desa*

Wardiyanta , 2006. *Metode Penelitian Pariwisata* , Yogyakarta : Andi

Osborne Devid dan Ted Gaebler. 1992. *Mewirusahaakan Birokrasi*, terj, Abdul Rasyid. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo

Yoiti, Oke.1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Yoeti, Oka, A. 2008 *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.

<http://dewifina.blokspot.com/2012/11/penataan-ruang-pada-dasarnya-merupakan.html> (28-11-2013)

<http://informasi-syarif.blokspot.com/2013/02/kebijakan-pariwisata-di-aceh-analisis.html> (02-12-2013)

<http://nisselatanku.com/2013/07/31/strategi-pengembangan-dan-promosii-pariwisata-nias/> (02-12-2013)

